

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah maka Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Bontang. Selain itu, Pelaporan Kinerja ini juga merupakan alat akuntabilitas keuangan sebagai media evaluasi untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagai wujud penerapan anggaran berbasis prestasi kerja (*performance based budgeting*).

Kami berharap Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2018 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Bontang, 18 Maret 2019

Plt, INSPEKTUR

ENIK RUSWATI, SE, MM, Ak, CA
NIP. 1968102919900320054

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja (*annual performance report*) merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat akuntabilitas kinerja yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja dalam rangka pertanggungjawaban hasil kinerja perangkat daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 menyatakan bahwa laporan kinerja instansi pemerintah daerah merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menegaskan pula bahwa pelaporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban atas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pelaporan kinerja Inspektorat Daerah tahun 2018 memberikan penjelasan pencapaian kinerja (*performance results*) yang memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gaps*) atas pelaksanaan perjanjian kinerja (*performance agreement*) guna perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang. Inspektorat Daerah berperan memberikan nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) kepada Walikota Bontang bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintahan Kota Bontang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bontang 2016-2021 secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peran penting ini telah digambarkan dalam visi Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 yakni “APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota Bontang yang Cerdas Ke Arah yang Lebih Baik (*Smart Governance for Better Government*)”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan misi tahun 2016-2021 adalah “Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang yang Taat, Akuntabel dan Efektif (*The Quality Achievements of Three Sustainable Urban Development Programs; Smart City, Green City and Creative City*)”. Peta strategis yang disusun menggunakan *balance scored card* yang terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan; perspektif proses internal (*internal business process*); perspektif kelembagaan (*learning and growth*); dan perspektif keuangan (*financial*) sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) dan untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).










Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2018 terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja termasuk 9 (sembilan) indikator kinerja utama (IKU). Target kinerja fiskal Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp2.883.798.650,00 yang operasionalisasinya didukung 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan.










Hasil pengukuran kinerja diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 91,67% kategori “Sangat Memuaskan”.

2. Nilai akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja yang diukur melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 94,61% kategori “Sangat Tinggi”.
3. Nilai akuntabilitas keuangan sasaran strategis Perjanjian Kinerja mencapai 93,45% kategori “sangat Tinggi”.
4. Nilai rata-rata efisiensi sumber daya sasaran strategis adalah sebesar 26,60% masih dalam kategori “produktif”.

Rincian capaian akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2016			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.	Perspektif Pengguna Layanan (<i>Stakeholders</i>)				85,81%	
A.1.	Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				89,5%	
A.1.1	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	3	3	100%	
A.1.2.	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	3	3	100%	
A.1.3.	Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	82,5	86,9	105%	
A.1.4.	Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	75	40,13	53%	
A.2.	Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang				100%	
A.2.1.	Indeks opini BPK atas LKPD	Skor	4 (WTP)	4 (WTP)	100%	
A.3.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang				50%	
A.3.1.	Indeks RB Kota Bontang	Skor	B	B	100%	
A.3.2.	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	PD	1	0	0	
A.4.	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang				55,38%	
A.4.1.	Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan kategori “Memuaskan”	%	100	55,38	55,38%	
A.5.	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif				100%	
A.5.1.	Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100%	

NO.	PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2016			STATUS
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
A.6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang				120%	
A.6.1.	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3	3,717	120%	
B.	Proses Internal (<i>Internal Business Process</i>)				98,61%	
B.1.	Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang				98,61%	
B.1.1	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	2	67%	
B.1.2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks	3	3,33	111%	
B.1.3	Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pengawasan	%	70	72,5	103,57%	
B.1.4	Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah	%	≥ 84	94,83	112,88%	
C.	Pembelajaran dan Pertumbuhan (<i>Learning and Growth</i>)				100%	
C.1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional				100%	
C.1.1	Tingkat efektifitas penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah <i>(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah)</i>	Skor	Baik	Baik	100%	
C.2.	Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan				-	
C.2.1	Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat Daerah	Level	3	-	-	Belum dapat diukur
C.3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana dalam tata kelola organisasi				100%	
C.3.1	Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK	Tahap	40%	40%-	-	
C.3.2	Jumlah utilitas aset kondisi baik	%	100	100	100%	
D.	Keuangan (<i>Financial</i>)				107,03%	
D.1.	Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif				107,03%	
D.1.1	Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaran responsif gender (ARG)	%	100	100	100%	
D.2.1	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah	%	80	91,25	114,06%	

Walaupun nilai akuntabilitas kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja mencapai 94,61% dengan kategori “Sangat Tinggi”, namun capaian indikator kinerja sasaran strategis belum seluruhnya memenuhi ekspektasi. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja diketahui capaian 5 (lima) indikator kinerja telah melebihi ekspektasi (status biru), 10 (sepuluh) indikator kinerja telah memenuhi ekspektasi (status hijau) dan 4 (empat) indikator kinerja tidak memenuhi ekspektasi (status merah) serta 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur capaiannya. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya karena faktor penetapan kebijakan daerah terkait pelaksanaan kinerja sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi secara berkala.
3. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala.
4. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.
5. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based performance management system*).
7. Memperkuat sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit management system*).
8. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPU) Kota Bontang.
9. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara efektif.
10. Proses bisnis Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern (*business process based on modern information communication technology*).
11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kepada masyarakat.
12. Mengusulkan pengisian jabatan struktural yang masih lowong.
13. Perbaikan formula perhitungan indikator kinerja yang cukup.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 2016-2021, Inspektorat Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis.